

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi isu penting lantaran adanya instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang dalam negeri serta memberdayakan dan mendorong UMK untuk dilibatkan dalam katalog elektronik. Berdasarkan laporan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2022 masih terdapat 16 K/L/PD memiliki nilai realisasi PDN sangat rendah begitu juga dengan nilai realisasi UMK pada 44 K/L/PD yang mana kurang dari 20% saat melakukan pengadaan melalui E-Marketplace Pemerintah, Katalog Elektronik. Sehingga, saat ini katalog elektronik belum mampu untuk mendukung kegiatan pengadaan yang berorientasi pada produk dalam negeri dan melibatkan peran serta UMK. Maka dari itu, perlu adanya penggalan kebutuhan pengguna katalog elektronik, mengetahui kriteria dan sub kriteria pada E-Marketplace publik dan prioritas kebutuhan khususnya pada E-Marketplace Katalog Elektronik yang kemudian dapat diketahui rekomendasi pengembangan aplikasi yang perlu untuk diprioritaskan. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode borda count berdasarkan peringkat preferensi pengguna diperoleh kebutuhan yang perlu diprioritaskan lebih lanjut adalah dimunculkannya notifikasi, tersedianya *help desk*, memiliki alur negosiasi yang praktis, dapat membuat satu pertanggungjawaban dalam satu paket pembelian yang dimana isinya memuat banyak produk dan penyedia, adanya penandaan untuk produk PDN/impor, adanya struktur harga yang dibakukan, melakukan penyederhanaan informasi klasifikasi baku komoditi, terdapat panduan pendaftaran pada aplikasi dan panduan menilai TKDN, adanya pembatasan transaksi atas persetujuan kedua pihak serta memuat *dashboard* laporan transaksi secara real-time.

Kata Kunci: *Pengadaan Publik, Katalog Elektronik, Prioritas Kebutuhan, Borda Count*